

Latihan Operasi Laut, Puspenerbal Keluarkan Dua Drone Scan Eagle

JAKARTA (IM) - TNI Angkatan Laut melalui Pusat Penerbangan TNI AL (Puspenerbal) menggelar latihan bersandi Latihan Operasi Laut (Latopsla) Aspek Laut 2023, di perairan Laut Jawa wilayah Surabaya, Situbondo, dan sekitarnya, Senin (30/10) hingga Selasa (7/11).

Komandan Puspenerbal (Danpuspenerbal) Laksamana Muda Sisyan Jaffar selaku direktur latihan telah memimpin apel, mengecek kesiapan dan kelengkapan latihan di Apron Base Ops Lanudal Juanda, Jawa Timur, pada Kamis (2/11).

Danpuspenerbal mengatakan, latihan ini merupakan ajang untuk mempertahankan dan meningkatkan profesionalisme prajurit dalam mengawaki sistem senjata armada terpadu (SSAT).

"Khusus Puspenerbal, pelaksanaan Latopsla Aspek Udara 2023 ini agar mampu secara maksimal mendukung unsur SSAT yang sedang melaksanakan tugas operasi militer perang (OMP), baik operasi laut maupun operasi ampibi, guna mencegah atau mempertahankan kedaulatan wilayah NKRI dari pihak asing atau musuh," kata Sisyan Jaffar dalam keterangan Pusat

Penerangan (Puspen) TNI, Jumat (3/10).

Dalam latihan kali, Puspenerbal mengeluarkan dua unit drone atau unmanned aerial vehicle (UAV) Scan Eagle. Pesawat nirawak hibah dari Amerika Serikat ini dilengkapi dengan kamera optik dan infra merah, dengan kecepatan jelajah 60 knot, ketinggian penerbangan hingga 20 ribu kaki, dan endurance hingga 16 jam.

Selain itu, juga dikerahkan personel dan unsur dari Crew Pesud Casa NC212-200 Aviocar 6208, Crew Pesud Casa NC212-200 Aviocar 6206, Crew Pesud Heli As 565 Mbe HS-1310, dan Crew Pesud Bell 412 HU-4206. Tak ketinggalan satu peleton penjerun Kopaska (Komando Pusukan Katak), satu peleton penjerun Intai Amfibi Pasmar, satu peleton Koarmada 2, dan satu peleton kesehatan juga diterjunkan.

Materi latihannya antara lain Terjun Malam, Rubber Duck Operation (RDO) Malam, Intai Udara, GKK Lintas Heli, Air Landed, Air Suplay, SAR Tempur, EMU, dan Shipboard. ● han

KY Terima Sebanyak 1.592 Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Hakim

JAKARTA (IM) - Komisi Yudisial (KY) menerima 1.592 laporan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim sepanjang Januari-September 2023.

"Ada 1.592 laporan masyarakat dan 1.062 surat tembusan terkait dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim dan permohonan pemantauan," ujar Ketua Badan Pengawas Hakim dan Investigasi Joko Sasmito saat konferensi pers di Gedung KY, Jumat (3/11).

Jumlah laporan ini meningkat dibandingkan dengan laporan periode tahun 2022 yang berjumlah 1.158 laporan. Dari laporan yang masuk, KY melakukan verifikasi kelengkapan persyaratan dan disimpulkan sebanyak 204 laporan telah memenuhi persyaratan.

"Terdiri dari 53 laporan sebelum tahun 2023 dan 151 laporan di tahun 2023," jelasnya.

Sedangkan 353 laporan lainnya masih menunggu permohonan kelengkapan, 147 laporan bukan kewenangan KY, 45 laporan diteruskan ke instansi lain. Sedangkan laporan yang tidak dapat diterima sebanyak 186 laporan, ada juga

laporan yang diteruskan ke bagian investigasi sebanyak 4 laporan.

"Serta masih proses verifikasi 54 laporan, dan permohonan pemantauan-persidangan sebanyak 652 permohonan," tutur Joko.

Berdasarkan jenis perkara, masalah perdata masih mendominasi dengan jumlah 844 laporan.

"Sementara perkara pidana jumlahnya 397 laporan, kemudian pengaduan terkait tindak pidana korupsi sebanyak 71 laporan, perkara tata usaha negara sebanyak 62, perkara agama sebanyak 61, dan niaga sebanyak 41 laporan," ucapnya.

Untuk perkara pengadilan hubungan industri yang dilaporkan ke KY sebanyak 20 laporan, perkara pajak sebanyak 11 laporan, perkara lingkungan ada 10 laporan, perkara militer sebanyak 7 laporan, perkara syariah sebanyak 5 laporan, perkara pidana dan perdata sebanyak 4 laporan, perkara pemilu sebanyak 2 laporan dan 57 perkara lainnya. ● mei

KPU Tetapkan 9.917 Orang Masuk Daftar Calon Tetap Anggota DPR RI

JAKARTA (IM) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menetapkan daftar calon tetap atau DCT anggota DPR RI. Sebanyak 9.917 orang masuk DCT di Pemilu 2024.

"Kita tetapkan DCT hari ini 9.917 ini meliputi 18 parpol," kata Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari dalam konferensi pers di kantor KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (3/11).

Hasyim menjelaskan mulanya bacaleg yang masuk ke dalam DCS ialah 9.919 orang. Namun, setelah adanya tanggapan dan masukan masyarakat berubah menjadi 9.918.

"Lalu setelah diumumkan ada tanggapan masyarakat dan kemudian yang diajukan

untuk masuk DCT dari 18 parpol, 9.918," jelasnya.

Dari 9.918 orang, dilakukan verifikasi kembali. Maka, total keseluruhan DCT ada 9.917 orang.

"Artinya kan berkurang satu orang atau satu nama, 9.918 itu setelah kita verifikasi jumlahnya yang MS untuk masuk DCT yang kita tetapkan DCT hari ini 9.917," paparnya.

Sedangkan untuk DPD total 668 orang masuk DCT yang terdiri dari 535 laki-laki dan 133 perempuan. Nama-nama mereka akan diunggah oleh KPU di website KPU. Pengumuman nama-nama akan dilakukan pada Sabtu (4/11). ● mei

2 Polhukam

FOTO: ANTARA

DAFTAR CALON ANGGOTA DPD						
Jumlah Calon	Bakal Calon Mengikuti Penyerahan Dukungan			Jumlah Bakal Calon Memenuhi Syarat Dukungan		
	MS	BMS	TMS	MS	TMS	Laki-laki
865				701		
Jumlah Bakal Calon Tidak Mendaftar	Verifikasi Administrasi			Verifikasi Akhir		
	MS	BMS	TMS	MS	TMS	Laki-laki
18	113	568	2	67	8	5
TMS Pasca DCS				Daftar Calon Sementara		
TMS terkait Putusan MA				Laki-laki		
1				535		

PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DPR DAN DPD

Ketua KPU Hasyim Asy'ari (kiri), bersama anggota KPU August Mellaz (kanan), Mochamad Afifuddin (kedua kiri) dan Yulianto Sudrajat (kedua kanan) menunjukkan data digital kepada wartawan saat keterangan pers di Gedung KPU, Jakarta, Jumat (3/11). KPU menetapkan Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPR sebanyak 9.917 orang sedangkan untuk DPD sebanyak 668 orang untuk Pemilu 2024.

Goenawan Mohamad Sebut Gibran Didesain untuk Perpanjangan Kekuasaan

Goenawan Mohamad menilai Jokowi lakukan berbagai cara untuk memperpanjang kekuasaannya, termasuk menggunakan anak sulungnya.

JAKARTA (IM) - Budaya Goenawan Mohamad menyampaikan kekecewaannya terhadap Presiden Joko Widodo. Kekecewaan itu terkait sikap Presiden yang dinilai ingin memperpan-

gaku pada awalnya ia sangat senang terhadap Presiden Jokowi yang tidak meneruskan wacana perpanjangan masa jabatannya.

"Saya terakhir itu, saya kan (merasa) sangat gembira, bahwa Pak Jokowi tidak calonkan di term ketiga," ujar Goenawan dalam acara Rosi yang bertajuk "Rakyat Percaya Siapa: Jokowi, Ketua MK atau Gibran" sebagaimana dilansir YouTube Kompas TV, Jumat (3/11).

Goenawan menyebut, dalam sejarah politik dunia, Presiden Amerika Serikat pertama, George Washington memilih untuk tidak melanjutkan pemerintahan hingga periode ketiga.

Langkah tersebut, menurut dia, ikut mempengaruhi kondisi sistem politik di Amerika yang terawat hingga saat ini.

Namun, ia menyesalkan Presiden Jokowi justru melakukan berbagai cara untuk memperpanjang kekuasaannya, termasuk dengan menggunakan anak sulung-

Gibran yang semula tidak memenuhi syarat sebagai capres atau pun cawapres karena usianya yang masih 36 tahun itu, bisa melenggang maju usai Mahkamah Konstitusi yang diketuai ipar Jokowi

mengubah persyaratan.

"Ternyata Pak Jokowi menghendaki itu (memperpanjang kekuasaan)," kata Goenawan.

"Dan yang sekarang dilakukan dengan membawa Gibran ke cawapres adalah bagian dari desain untuk memperpanjang kekuasaannya," katanya.

Pendiri Majalah Tempo ini pun meyakini, nantinya Gibran yang berpasangan dengan Prabowo Subianto hanya akan jadi kepanjangan tangan Jokowi apabila memenangi pemilu.

"(Nantinya) yang jadi Presiden Prabowo Subianto dan di situ ada (Wapres) Gibran yang dia (Jokowi) kendalikan. Nah kemudian masalahnya adalah pertanggungjawaban konstitusinya bagaimana?" katanya. ● han

Kartu Truf Ketum Parpol Sudah Dipegang Agar Mendukung Gibran Menjadi Cawapres

JAKARTA (IM) - Juru Bicara Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Usman M'Tokan alias Donnie, sepakat dengan pernyataan Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto, soal adanya ketua umum partai politik (parpol) yang kartu trufnya sudah dipegang agar mengusung putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden.

Menurut Donnie, pernyataan Hasto bisa juga dimaknai sebagai bentuk kekhawatiran terhadap jalannya demokrasi di Indonesia.

"Kekhawatiran itu hal wajar karena kita sebagai manusia normal ya, dalam dunia politik itu, situasi politik berubah, dinamis lah," kata Donnie kepada wartawan, di Jakarta, Kamis (2/11) malam.

"Sehingga kita juga karena PPP kita bersama, kerja sama (dengan PDI-P), maka kita mendukung pernyataan Mas Hasto itu," katanya.

Kendati demikian, Donnie mengatakan tidak mengetahui siapa ketum parpol yang dipegang kartu trufnya tersebut.

Seperti diketahui, pasangan bakal capres - cawapres, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming, diusung oleh parpol Gerindra, Golkar, Demokrat, dan Partai Amanat Nasional. Sejumlah parpol non parlemen juga ikut mendukung pasangan ini, yakni Partai Bulan Bintang, Partai Solidaritas Indonesia, Partai Gelora, dan Partai Garuda.

Donniemenduga ada pihak tertentu ingin mencoba melemahkan pihak lainnya. Dia tak menyebut spesifik siapa pihak tertentu dan pihak lain itu.

Ia hanya memastikan, PPP bersama PDI-P yang telah berkoalisi mengusung Ganjar Pranowo-Mahfud MD terus berbaik sangka dan berikhtiar demi kebaikan bangsa.

"Enggak boleh ada yang boleh klaim bahwa pesta demokrasi milik mereka

(pihak tertentu)," katanya menambahkan.

Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto sebelumnya menyebut, pencalonan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal cawapres terjadi lantaran adanya rekayasa hukum di Mahkamah Konstitusi (MK). Sebab, awalnya Gibran yang berusia 36 tahun tidak memenuhi syarat untuk mendaftar sebagai capres atau cawapres.

Namun, Mahkamah Konstitusi yang diketuai oleh paman Gibran memutuskan mengabulkan uji materi yang mengubah ketentuan itu. Bahkan, Hasto mengklaim, ada ketum partai politik yang kartu trufnya dipegang.

"Saya sendiri menerima pengakuan dari beberapa ketua umum partai politik yang merasa kartu trufnya dipegang. Ada yang mengatakan life time 'saya hanya harian', lalu ada yang mengatakan 'kerasnya tekanan kekuasaan,'" ungkap Hasto. ● han

Achsanul Qosasi Jadi Tersangka Baru Kasus Korupsi BTS 4G, Hartanya Rp24,8 M

JAKARTA (IM) - Kejadian tetapan Achsanul Qosasi (AQ) sebagai tersangka baru kasus tindak pidana korupsi penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2020-2022.

Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, Kuntadi mengatakan, Achsanul diduga menerima uang sebesar Rp 40 miliar yang diduga terkait dengan jabatannya sebagai Anggota III Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Uang tersebut diterima dari Irwan Hermawan melalui Winda Purnama dan Sadikin Rusli.

"Setelah dilakukan pemeriksaan secara intensif dan dikaitkan dengan alat bukti yang telah kami temukan sebelumnya, maka tim berkesimpulan telah ada cukup alat bukti untuk menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka," kata Kuntadi saat konferensi pers di Gedung Kejagung, Jakarta, Jumat (3/11).

Selanjutnya, kata Kuntadi, guna kepentingan penyidikan lebih lanjut, Achsanul ditahan di rumah tahanan (rutan) Salemba Cabang Kejari Jakarta Selatan.

Lantas, berapa jumlah kekayaan Achsanul? Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHK-PN) yang dilaporkan AQ pada 20 Maret 2023, total kekayaan Anggota III Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) itu mencapai Rp24,8 miliar, tepatnya Rp24.853.836.289.

AQ tercatat memiliki 12 tanah dan bangunan yang tersebar di Jakarta Selatan, Bogor, dan Sumenep yang mencapai dengan jumlah Rp21,8 atau tepatnya Rp21.849.891.000.

Selain itu, AQ memiliki

harta berupa alat transportasi dan mesin yang terdiri dari tujuh mobil dengan nilai Rp1,4 atau persisnya Rp1.477.026.800.

Kekayaan lainnya yang tercatat berupa harta bergerak lainnya serta kas dan setara kas yang masing-masing senilai Rp4.356.000.000 (Rp4,3 miliar) dan 2.006.368.314 (Rp2 miliar).

Kendati demikian, AQ juga tercatat memiliki hutang sebesar Rp4,8 miliar atau tepatnya Rp4.835.449.825. Dengan jumlah kekayaan dikurangi hutang, tercatat AQ memiliki kekayaan sebesar Rp24.853.836.289.

Penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung menetapkan Anggota III Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Achsanul Qosasi (AQ), sebagai tersangka baru dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2020-2022.

"Tim berkesimpulan telah ada cukup alat bukti untuk menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka," kata Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Kuntadi saat konferensi pers di Gedung Bundar Kejagung, Jakarta, Jumat (3/11).

Sebelumnya, Achsanul Qosasi terus menjadi sorotan publik, terutama setelah namanya muncul dalam persidangan. "Tim penyidik melalui Jaksa Agung sudah mengirimkan surat ke Presiden, sehingga saat ini kita menunggu persetujuan tersebut untuk memanggil saudara AQ (Achsanul Qosasi) sebagai saksi," kata Ketut. ● han

mandiri

PENAWARAN PENGALIHAN PIUTANG (CESSIE)

Bahwa dalam rangka penyelesaian kredit bermasalah, PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk akan melakukan penjualan atau pengalihan piutang (Cessie) terhadap list debitur sebagai berikut :

No.	Nama	Alamat	Jumlah Kewajiban Per Tgl 03/11/2023	Agunan Kredit
1.	Budi Cahyadi B2N UD Kima Sari Lestari	Jalan Harapan Jaya VI RT003 RW/006 Kel. Jelanbana Baru, Kec. Grogol Petamburan Jakarta Barat	Rp. 3.435.195.413,10	Komplek Ruko Prima Ciputat Blok A No. 23 Jl. Otista Raya, Ciputat Kota Tangerang

Apabila ada yang berminat dalam pengalihan kredit debitur di atas dapat menyampaikan penawaran secara tertulis ke alamat dibawah ini paling lambat tanggal 07 November 2023, jam 12.00 WIB.

PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.
Collection & Recovery Group
Collection & Recovery Center Jakarta
Wisma Mandiri II Lt.17
Jl. Kebon Sirih No.83, Jakarta 10340.
Telp. 30023902 Ext. 7224393.

Demikian untuk di ketahui semua pihak.

Jakarta, 04 November 2023
PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.
Collection & Recovery Center Jakarta